

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang 1 berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga 1 dan Raja Merlang 2, tetap berkedudukan di Malaka. Sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau perdana menteri pada tahun 1473, waktu Raja Narasinga 2 yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah filalam (sultan Indragiri IV), beliau menetap di ibukota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim ibukota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa berdatanganlah orang-orang dari suku banjar dan suku bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku banjar,

perpindahannya akibat dihapuskannya kerajaan banjar oleh Gubernament pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963.

2. Masa Penjajahan Belanda

Dengan adanya tractaat Van Vrindehaap (perjanjian perdamaian dan persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka kesultanan Indragiri menjadi Zeltbestuur berdasarkan ketentuan tersebut, diwilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran:

- a. Amir Tembilahan di Tembilahan
- b. Amir Batang Tuaka di Sungai Luar
- c. Amir Tempuling di Sungai Salak
- d. Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah
- e. Amir Enok di Enok
- f. Amir Reteh di Kota Baru

Controlleur memegang wewenang semua jabatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah sehingga Zeltbestuur Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

3. Masa Pendudukan Jepang

Bala Tentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat, tanggal 2 april 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang

waktu itu dibawah Conrolleur K.Ehaling, sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya didaerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

4. Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada awal kemerdekaan RI, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten, Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan Singingi dengan Ibukotanya Taluk Kuantan, kewedanaan Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat dan kewedanaan Indragiri Hilir Ibukotanya Tembilahan.

5. Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Riau agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi daerah tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh gubernur maupun departemen dalam negeri maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No.49, maka daerah persiapan kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi kabupaten daerah tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten

Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

B. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Secara geografis, daerah ini berada pada posisi $0^{\circ} 36' \text{ LU}$, $1^{\circ} 07' \text{ Ls}$ dan antara $102^{\circ} 32'$ dan $104^{\circ} 10' \text{ BT}$, terletak dibagian timur provinsi Riau dengan daerah seluas 11,605.97 km², lautan 6,318 km dan perairan umum 888.97 km² yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi
- Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Timur : Kabupaten Kepulauan Riau

Jumlah penduduk kabupaten Indragiri Hilir mencapai 639.330 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku/ etnik, seperti Banjar dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, dan Melayu dari Jambi. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada bersabdard pada sektor perkebunan yang meliputi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, dah Kehutanan. Berdasarkan aktifitas bisnis / sumber kehidupan, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 69.01% sector pertanian 8.58%, pelayanan 7.74%, perdagangan 1.54% industri dan yang lain-lain 1.54%. Luas areal untuk sector pertanian 160,637 Ha sementara sector perkebunan memiliki lahan seluas 454,831 ha.

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tertinggi 1.300 mm. Musim penghujan tiba pada bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau tanpa hujan sama sekali berlangsung selama 3 bulan dan menimbulkan masalah dalam memperoleh Air bersih, irigasi, dan lain-lain. Arus angin dalam sepanjang tahun adalah angin utara dan angin selatan. Sepanjang musim angin utara, gelombang dan pasang relatif tinggi hingga air asin ke hulu sungai.

Secara umum, kondisi tanah terdiri dari tanah gambut dan rawa-rawa yang sangat potensial untuk perkebunan Kelapa hibrida, itulah sebabnya Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai gudang kelapa di Provinsi Riau.

C. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir

1. Visi

Visi Kabupaten Indragiri Hilir adalah spirit baru Indragiri Hilir menuju Kabupaten yang maju, bermartabat dan bertaqwa.

2. Misi

Misi Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan dalam 5 pilar, 5 kisi dan 8 program utama pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

a. 5 (lima) pilar pembangunan Indragiri Hilir :

Pilar Pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan pemerintahan lewat praktek tata kelola yang bersih dan

baik (good governance) dengan menerapkan pemerintahan daerah yang aman dan masyarakatnya partisipatif dalam pembangunan.

Pilar Kedua, mengembalikan kejayaan kabupaten Indragiri Hilir yang didalam sejarahnya dikenal sebagai salah satu daerah maju dan terdepan dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi SDA dan SDM.

Pilar Ketiga, memperkuat pelaksanaan demokrasi semangat gotongroyong, memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, serta mendukung supremasi hukum.

Pilar Keempat, meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan antara pemangku kepentingan di daerah maupun dalam hubungan lintas kota/Kabupaten lainnya, Provinsi nasional dan internasional dalam rangka menata pembangunan Inhil.

Pilar Kelima, mendorong terwujudnya prestasi-prestasi pembangunan yang mengutamakan partisipasi dan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya, sehingga Inhil menjadi barometer baru pencapaian kemajuan pembangunan di Provinsi Riau.

b. 5 (lima) kisi pembangunan Indragiri Hilir:

Pertama, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah (jalan desa, jembatan, pasar, perhubungan desa-kota, listrik, tata air, fasilitas umum, dsb) secara lebih merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil.

Kedua, meningkatkan kualitas SDM yang tawakal, berahlak mulia, profesional, unggul dan sehat sehingga berdaya saing lebih tinggi melalui inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau.

Ketiga, memajukan perekonomian daerah yang bertumpu pada pengelolaan ekonomi pertanian (termasuk perkebunan, perikanan dan peternakan), perdagangan, industri dan pariwisata berlandaskan potensi setempat, memanfaatkan kemajuan iptek dan didukung investasi dunia usaha yang diselaraskan dengan penjagaan martabat masyarakat dan jatidiri daerah kabupaten Inhil.

Keempat, mengembangkan ekonomi kreatif guna menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga dan masyarakat Inhil.

Kelima, meningkatkan kualitas penataan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ibukota kabupaten secara lebih rapi, modern dan indah guna mendukung pelayanan dasar maupun umum, sehingga kota Tembilahan menjadi kota yang lebih dicintai dan dibanggakan masyarakat Inhil.

c. 8 (delapan) program utama Indragiri Hilir:

Pertama, reformasi pelayanan birokrasi yang bersih, mudah, cepat, adil dan ramah dalam melayani warga sejalan dengan pembinaan aparatur dengan system meritokrasi yang objektif, profesional, bersih dan sejahtera.

Kedua, program desa maju Inhil Jaya lewat percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara integrasi, berkualitas dan merata hingga seluruh penjuru desa. Termasuk perbaikan harga dan diversifikasi ekonomi perkebunan kelapa rakyat dimulai dengan penataan regulasi yang lebih menguntungkan petani dan masyarakat Inhil.

Ketiga, pendidikan berkualitas dan terjangkau serta meningkatkan akses pendidikan masyarakat.

Keempat, inovasi pelayanan kesehatan lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau.

Kelima, peningkatan peluang kesempatan kerja lewat program Inhil bergerak yang dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Keenam, program kewirausahaan sosial melalui pemberdayaan masyarakat Inhil kreatif berahlak mulia dengan program sosial keagamaan, organisasi pemuda, kelompok perempuan dan kelompok usaha ekonomi kreatif, pembina kewirausahaan sosial berbasis program terintegrasi (terpadu) lintas SKPD.

Ketujuh, penataan pembangunan ibukota kabupaten yang rapih, modern, indah dan bermartabat.

Kedelapan, pengelolaan daerah aliran sungai secara terintegrasi dengan fungsi ketahanan ekonomi masyarakat, manajemen mitigasi bencana serta penerapan iptek dan pembangunan pariwisata.

D. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Indragiri Hilir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
 - a. Tugas Dinas Pendidikan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan.
 - Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Kesehatan
 - a. Tugas Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan.
- Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika

a. Tugas Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Dinas Sosial

a. Tugas Dinas Sosial membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha miko, kecil dan menengah.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Tugas Dinas Pekerjaan Umum membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- a. Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Dinas Pendapatan Daerah

- a. Tugas Dinas Pendapatan Daerah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Dinas Perkebunan dan Kehutanan

- a. Tugas Dinas perkebunan dan Kehutanan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkebunan dan kehutanan.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan dan kehutanan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Dinas Kelautan Dan Perikanan

- a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Dinas Pertambangan Dan Energi

a. Tugas Dinas Pertambangan dan Energi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertambangan dan energi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1), Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.